

PERANAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK

Oleh:

Gurniwan K. Pasya^{*)}

Abstrak

Tuntutan persamaan hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum wanita selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Prestasi dan keterampilannya tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dan peranan wanita dalam kehidupan politik di negara kita. Kekuatan berupa ketegaran, ketegasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki wanita sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang wanita pemimpin lebih besar dari tanggung jawab laki-laki, dimana wanita berperan ganda yang juga memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga maupun tanggung jawab kewanitaannya lainnya. Kesejajaran antara wanita dengan laki-laki merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia apabila wanita berusaha sesuai dengan kemampuannya, untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat kewanitaannya.

Kata Kunci: Wanita, Peranan.

1. Pengantar

Kemajuan jaman telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA. Kartini, walaupun banyak wanita-wanita lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama, tetapi perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma (1960 : 151-152) sebagai berikut,

Wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita.

^{*)} Dr. Gurniwan Kamil Pasya, M.Si. Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI

Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli wanita. Malah menjadi kepala jawatan atau presidenpun tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaan tadi, karena jabatan-jabatan ini, kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak.

Tuntutan persamaan hak wanita tentunya didasarkan pada beberapa anggapan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, sebagaimana dikemukakan Presiden Pertama Indonesia, Sukarno (1963 : 30) bahwa:

... ini tidak menjadi bukti bawa dus kwaliteit otak perempuan itu kurang dari kwaliteit otak kaum laki-laki, atau ketajaman otak perempuan kalah dengan ketajaman otak laki-laki. Kwaliteitnya sama, ketajamannya sama hanya kesempatan-bekerjanya yang tidak sama, kesempatan berkembangnya yang tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasihnya kesempatan oleh masyarakat sekarang pada kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ke-tidak-adilan masyarakat terhadap kepada kaum perempuan itu !

Jelas sekali pendapat di atas bahwa kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap wanita harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Tetapi dengan adanya kemajuan jaman maka wanita dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa wanita perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisi pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo (1987 : 237) yaitu,

Kemampuan wanita memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tak dapat dikerjakan oleh wanita seperti dikerjakan oleh pria. Dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah dari pria, kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.

Kemajuan dan karier yang dicapai seorang wanita tidak dapat begitu saja diberikan atas dasar belas kasihan, melainkan melalui perjuangan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi gender, seperti yang dikemukakan oleh Hall (dalam Tan, 1991 : 105) sebagai berikut,

... kaum perempuan sendiri harus bekerja keras, dengan bekerjasama, untuk menjamin agar suara mereka didengar dan prespektif mereka dibeberkan di meja tempat pengambilan keputusan. Perempuan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru, termasuk tugas mengambil keputusan di tangan sendiri. Hal ini khususnya berlaku di bidang ilmu pengetahuan, perekayasaan, matematika, dan teknologi, jika ingin anak perempuan kami tidak dibiarkan ketinggalan kereta.

Kesejajaran wanita dengan laki-laki sebagai suatu usaha yang tidak sia-sia apabila wanita itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuan yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat kewanitaannya. Persamaan hak yang dimiliki oleh kaum wanita Indonesia termasuk kepemimpinan dan partisipasi dalam bidang politik. Walaupun wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki bukan berarti yang bersangkutan harus meninggalkan tugas-tugas kewanitaannya sebagai seorang ibu.

2. Peran Ganda Wanita

Wanita dalam kehidupannya mempunyai beban tugas yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Peran ganda dari seorang wanita masa kini, selain memiliki tanggung jawab di dalam rumah sebagai ibu juga di luar rumah sebagai wanita karier. Peran wanita ini secara sederhana menurut Suwondo (1981 : 266) dikemukakan,

- a. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja; yang dapat disebut fungsi ekstern;
- b. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga; yang dapat disebut fungsi intern.

Fungsi ekstern dan fungsi intern tersebut merupakan dasar peran yang dimiliki wanita terutama mereka yang memiliki karier, sehingga wanita harus benar-benar dapat mengatur perannya agar kedua peran tersebut tidak ada yang terabaikan. Jika tidak, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang, sehingga tidak jarang di antara mereka memilih salah satu peran, akibatnya terdapat salah satu peran yang dikorbankan. Apabila terus memilih karier tidak jarang di antara mereka yang menyebabkan keretakan bahkan perceraian rumah tangga, atau wanita itu sendiri memilih kariernya dengan mengabaikan perkawinan, sehingga yang bersangkutan tetap hidup tanpa didampingi suami atau tetap lajang. Sedangkan bagi wanita yang bersuami yang memilih peran kedua, berarti yang bersangkutan mengorbankan kariernya atau keluar dari pekerjaan dengan menjadi ibu rumah tangga yang tinggal diam di rumah, sehingga hal ini patut disayangkan karena potensi yang terdapat dalam diri wanita bersangkutan menjadi terbenam, bahkan terkubur selamanya. Dengan demikian, wanita yang hanya memilih salah satu peran saja sekarang ini dianggap kurang baik dalam membina kehidupan, karena itu wanita yang unggul dan tangguh ia dapat berjuang menghadapi berbagai tantangan apabila memilih peran ganda

seperti di atas, tetapi jangan lupa harus terdapat saling pengertian dan saling mengisi kehidupan rumah tangganya.

Tradisi yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini, bukan merupakan kewajiban bagi wanita yang bersuami bekerja secara formal, tetapi keadaan ini tergantung pada kemampuan ekonomi dan ijin yang diberikan suaminya. Atas dasar hal tersebut, maka dilihat dari hubungan suami – istri atau hubungan wanita dengan keluarga, dapat menimbulkan masalah apabila wanita bekerja. Berikut ini, beberapa pandangan yang menyebabkan wanita tidak bekerja atau tidak melaksanakan fungsi ekstern, walaupun terpaksa karena ada alasan tertentu sebagaimana Tilaar (dalam Tan, 1991 : 86-87) sebagai berikut,

1. perempuan belum/tidak menikah/cerai, dan pada dasarnya tidak ingin bekerja, tapi tidak mempunyai daya guna membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Perempuan belum/tidak menikah/cerai, senang bekerja, memiliki cukup dana untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi keluarganya tidak setuju/keberatan bila ia bekerja.
3. Perempuan belum/tidak menikah/cerai, ingin bekerja tetapi tidak mempunyai bekal ilmu dan dana guna membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.
4. Perempuan menikah, dan suami berpendapat bahwa pencari nafkah di antara mereka berdua cukup dibatasi pada suami dan pendapatan suami melebihi kebutuhan hidup papan sandang dan rekreasi berdua.
5. Perempuan menikah, dan suami berpendapat bahwa pencari nafkah di antara mereka cukup dibatasi pada suami, meskipun pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan hidup papan sandang pangan mereka berdua.
6. Perempuan menikah, yang bekerja dengan persetujuan suami namun kemudian mempunyai anak. Perempuan ingin tetap terus bekerja, meskipun pendapatan suami cukup untuk membiayai kebutuhan bersama istri dan anak.
7. Perempuan menikah, yang bekerja dengan persetujuan suami namun kemudian mempunyai anak. Perempuan pada dasarnya tidak mutlak ingin terus bekerja, namun pendapatan suami tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup bersama istri dan anak.

Nampaknya pada penjelasan di atas merupakan gambaran dari keadaan wanita Indonesia sekarang ini antara keinginan bekerja, dilarang untuk bekerja, dan tidak ingin bekerja dengan alasan tertentu. Sedangkan bagi kaum wanita yang benar-benar ingin bekerja, terdapat alasan tertentu seperti dikemukakan Tilaar (dalam Tan, 1991 : 86) yaitu,

1. Karena faktor ekonomi;
2. Karena orangtua telah memberikan kesempatan bagi si perempuan untuk menuntut ilmu, sehingga ia memiliki suatu keahlian yang memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk mencari nafkah sendiri;
3. Karena memang secara sadar ingin meniti karier.

Alasan untuk bekerja tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang dikehendaki wanita, karena dapat saja adanya alasan tertentu menyebabkan wanita tidak bekerja.

Di samping wanita bekerja baik di sektor formal maupun informal sebagai fungsi ekstern, juga seorang wanita tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai ibu yang menjadi fungsi intern. Lebih jauh lagi wanita yang memiliki fungsi ekstern harus berperan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa (dalam Suwondo, 1981 : 267) sebagai berikut,

1. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu, wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
2. Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peranan tersebut merupakan konsep yang harus dijalankan oleh wanita Indonesia sebagai fungsi eksternnya. Selanjutnya Suwondo (1981 : 267) mengemukakan kembali tugas-tugas wanita dalam keluarga dan masyarakat sebagai fungsi intern dan ekstern, sebagai berikut,

1. Sebagai istri, supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina keluarga yang bahagia;
2. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman, dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa;
3. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga;
4. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga;
5. Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat.

Tugas wanita seperti di atas merupakan peran ganda wanita di luar dan di dalam rumah yang sekaligus sebagai wanita yang diharapkan dalam pembangunan ini. Sehingga antara tugas rumah tangga dan tugas karier di dalam pekerjaannya akan menimbulkan resiko yang besar dalam hidupnya, sebagaimana dikemukakan Maria Ulfah Subadio (dalam Notopuro, 1984 : 54) sebagai berikut,

- ada wanita yang punya bakat dan cita-cita luhur, sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya ia memilih untuk tidak berumah tangga (tepat single);
- ada wanita yang susah merasa bahagia dengan memberikan pengabdianya kepada keluarga, jadi 100% menjadi ibu rumah tangga;
- ada wanita yang cakap dan mungkin karena ambisinya (eertzucht), rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian.
- Ada wanita memilih jalan tengah karena ia bekerja, maka menerima peran rangkapnya dengan coba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela karena kesadarannya bahwa baginya keluarga adalah penting juga.

Dengan demikian, bahwa jalan terbaik adalah membagi tugas sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita yang bekerja. Karena itu tugas wanita yang utama dari banyaknya tugas-tugas lain adalah membina keluarga bahagia sejahtera.

Tugas pokok wanita sebagai ibu, sebagai pemelihara rumah tangga, pengatur, berusaha sengan sepenuh hati agar keluarga sendiri sebagai masyarakat akan berdiri dengan tegak, megah, aman, tenteram dan sejahtera, hidup berdampingan dengan dan di dalam masyarakat. Sebagai ibu, seorang wanita dapat menciptakan persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan di manapun ia berada, secara damai dan harmonis.

Tugas terhadap keluarganya sendiri menjadikan sebagai keluarga yang rukun dan terhormat. Wanita bersangkutan berusaha, bekerja, dan memberikan segala sesuatu sebagai miliknya demi keutuhan keluarga, dengan sepenuh hatinya secara ikhlas menjaga kehormatan keluarga bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya. Sebagai pendamping suami, bagi seorang wanita berkeyakinan bahwa keluarga akan berdiri kuat dan berwibawa apabila antara wanita sebagai ibu dan suami sebagai bapak dalam rumah tangga berada dalam keadaan yang seimbang, selaras, dan serasi dengan landasan pengertian, kesadaram, dan pengorbanan. Ibu di dalam rumah tangga memegang peranan yang penting dan menonjol, terutama dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Begitupula dalam urusan ketatalaksanaan rumah tangga.

3. Kepemimpinan Wanita

Wanita sebagai seorang pemimpin formal pada mulanya banyak yang meragukan mengingat penampilan wanita yang berbeda dengan laki-laki, tetapi keraguan ini dapat

diatasi dengan keterampilan dan prestasi yang dicapai. Di dalam kepemimpinan baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki memiliki tujuan yang sama hanya saja yang berbeda dilihat dari segi fisik semata-mata, sebagaimana dikemukakan Kimbal Young (dalam Kartono, 1983 : 40) bahwa,

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu; berdasarkan akseptasi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.

Pemimpin yang memiliki kemampuan khusus dan diakui oleh kelompoknya termasuk ke dalam pemimpin informal, karena kepemimpinan tersebut lebih menekankan pada kekhususan tertentu terutama tempat dan individunya, sehingga seorang pemimpin terjadi atas dasar kemampuan atau keahlian tertentu, bukannya atas dasar kemampuan memimpin, misalnya kelompok wanita yang terampil dalam bidang pembuatan batik, sehingga yang paling ahli akan menjadi pemimpinnya, begitu pula kelompok wanita yang bekerja sebagai pembuat kain tenun, maka yang paling terampil akan diangkat sebagai pemimpin, dan seterusnya.

Pemimpin yang berada pada organisasi formal akan memiliki kekuasaan manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen pula, sehingga kekuasaan yang dimilikinya bersifat institusional dan tidak dihubungkan dengan sifat-sifat pribadi, misalnya, seorang wanita yang menjadi kepala sekolah, kemudian bawahannya baik guru-guru atau staf tata usaha tunduk kepadanya bukan pada pribadi melainkan pada kepemimpinannya karena ia sebagai pemimpin formal. Penting sekali untuk dikaji bahwa kepemimpinan seorang muncul dan dapat mensejajarkan dirinya dengan laki-laki apabila yang bersangkutan memiliki *n 'Ach* kebutuhan untuk mencapai prestasi, sebagaimana dikemukakan oleh M Clelland (dalam Weiner, tanpa tahun : 2) yaitu,

... virus mental yakni suatu cara berfikir tertentu yang kurang lebih sangat jarang dijumpai tetapi apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung untuk menyebabkan orang itu bertingkah laku sangat giat. ...Virus mental ini diberi nama *n Ach* (singkatan dari *need for achievement*), kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi). Sebab, ia ditemukan pada suatu macam pikiran yang berhubungan dengan “melakukan sesuatu dengan baik” ataupun “melakukan sesuatu dengan lebih baik” daripada yang pernah dibuat sebelumnya : lebih efisien dan lebih cepat, kurang mempergunakan tenaga, dengan hasil yang lebih baik, dan sebagainya.

Dengan demikian, bahwa seorang pemimpin dapat meningkatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan memiliki prestasi kerja yang lebih baik pula, sehingga seorang pemimpin wanita akan diakui kepemimpinannya oleh bawahan maupun orang lain karena kemampuan memimpin yang baik apalagi berhasil mencapai tujuan institusi yang dipimpinya.

Wanita yang menjadi seorang pemimpin formal termasuk seorang wanita karier yang akan banyak menghadapi berbagai masalah, terutama berhubungan dengan posisi yang bersangkutan antara karier dan rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh Noerhadi (dalam Tan, 1991 : 6 – 7) yaitu,

Bila semua wanita menjadi ibu rumah tangga, keberanian untuk berkarier tentu harus ditopang oleh kemampuan yang memadai, tetapi berkarier memerlukan pula tekad dan konsentrasi yang tadinya tidak dituntut pada wanita, jadi tidak dengan sendirinya menjadi modalnya. Pengembangan ambisi, keyakinan memimpin, upaya dan keberhasilan ambisi dilaksanakan dalam iklim kehidupan dengan suatu etika atau moralitas tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki wanita.

Kemampuan, ambisi, dan keberhasilan yang dicapai dengan tidak mengabaikan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, juga dapat bekerjasama dengan kaum laki-laki.

Kepemimpinan seorang wanita dilihat dari bentuk kedewasaannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, terutama sesuai dengan bidang yang dipimpinya tanpa meninggalkan sifat kewanitaannya. Karena itu, kepemimpinan wanita perlu didefinisikan kembali, seperti dikemukakan Noerhadi (dalam Tan, 1991 : 11) yaitu,

... ini berarti bahwa konsep kepemimpinan yang lebih memperoleh corak pengertian pria harus siap mengalami redefinisi sedemikian rupa sehingga kepemimpinan menurut perspektif wanita dimungkinkan. Masyarakat kita yang memberi tempat tinggi pada citra keibuan akan menopang pemimpin sebagai ibu dan sudah menjurus ke arah itu. kepemimpinan berarti kompetisi dan hierarki, berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab. Dari segi wanita ... pengertian ini perlu mendapat redefinisi, seperti halnya kekuasaan juga memperoleh redefinisi menurut konteks budaya yang kita hadapi.

Akhirnya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai bentuk kedewasaan. Sedangkan kedewasaan adalah kemampuan mengolah dilema ... penghayatan serta manifestasinya: integritas dan keterlibatan. Ciri khas kepribadian pemimpin terletak pada kedewasaan yang merupakan bentuk kepribadian yang pada wanita berkembang pula maskulinitas, pada pria aspek feminitas, dalam arti bahwa kepemimpinan sekaligus menggabungkan kedewasaan maskulin maupun feminim dalam satu pribadi : tegas dan peka, perkasa dan lembut, tegar tetapi penuh empati. Kepemimpinan berarti pengembangan sifat androgy, baik pada pria maupun pada wanita sehingga bagi wanita tidak melalaikan aspek maskulin pada perkembangan dirinya. ...

Wanita yang mampu dan bertindak sebagai pemimpin, memiliki sifat ganda baik sebagai wanita yang feminim maupun memiliki kekuatan berupa, tegas, tegar, dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat seperti halnya dilakukan laki-laki. Hal ini, merupakan sifat yang diperlukan seorang pemimpin, tanpa hal yang itu akan sulit dilaksanakan, mengingat banyak pendapat bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, tetapi sebenarnya tidaklah demikian.

Wanita sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi banyak hambatan yang berasal dari sikap budaya masyarakat yang keberatan, mengingat bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan kepala keluarga. Begitu pula hambatan fisik wanita yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas berat. Untuk lebih jelasnya Ibrahim (dalam Tan, 1991:16) menguraikan beberapa hambatan yang muncul dari kepemimpinan wanita, sebagai berikut,

Pertama, hambatan fisik. Perempuan, katanya, dibenani tugas “kontrak” untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Bayangkan jika perempuan harus melahirkan sampai lebih selusin anak. Pastilah usia produktifnya habis dipakai untuk tugas-tugas reproduktif yang mulia itu.

Kedua, hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk lelaki. Termasuk mendampingi mereka, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Perempuan, menurut cerita teologis seperti ini, diciptakan dari rusuk lelaki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang, dan secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti.

Ketiga, hambatan sosial budaya. Terutama dalam bentuk stereotipikal. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya, lelaki dinilai sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini menempatkan lelaki secara sosio-kultural lebih tinggi “derajatnya” dibanding perempuan.

Keempat, hambatan sikap pandang. Hambatan ini antara lain bisa dimunculkan oleh pandangan dikotomistis antara tugas perempuan dan lelaki. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan lelaki dilihat sebagai makhluk luar rumah. Pandangan dikotomistis seperti ini boleh jadi telah membuat perempuan merasa risi keluar rumah, dan visi bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan tidak layak digeluti lelaki.

Kelima, hambatan historis. Kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiperah seperti halnya lelaki.

Lima hambatan tersebut menyebabkan potensi kepemimpinan wanita menjadi tidak mendapat tempat yang layak di dalam kehidupan, tetapi dengan adanya arus informasi

dan komunikasi yang masuk dan diterima oleh kaum wanita menyebabkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan kepemimpinannya menjadi terbuka lebar. Bagi wanita yang memiliki pendidikan cukup sesuai dengan Undang-Undang Wajib Belajar telah memberi kesempatan kepada wanita untuk berkarier sesuai dengan kemampuannya apalagi dengan kuatnya arus informasi yang diterima di rumah melalui televisi, radio, surat kabar ataupun majalah, telah membuka cakrawala wanita untuk berusaha seluas-luasnya.

Apabila wanita sebagai ibu rumah tangga hanya bertugas sebagai makhluk yang harus melahirkan terus menerus tentu saja kesempatan untuk mengembangkan diri hampir tersita untuk mengandung, melahirkan dan mengurus anak, tetapi dengan adanya alat kontrasepsi menyebabkan kelahiran yang banyak dapat diatasi bahkan dijarangkan, sehingga kesempatan untuk mendidik anak dan mengembangkan dirinya menjadi lebih terbuka.

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin bagi wanita, tidaklah mudah terutama sekali adalah kemampuan yang ada dalam dirinya yang ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan dipegangnya, sehingga untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil terdapat beberapa nilai dasar kepemimpinan, menurut Tilaar (dalam Tan, 1991 : 71-72) sebagai berikut,

- a. intelegensi yang relatif lebih tinggi daripada yang dipimpin
- b. berfikir positif
- c. kedewasaan sosial dan cakupan jangkauan yang luas
- d. menjadi panutan yang baik
- e. menjadi pendengar yang baik
- f. keterbukaan dalam berkomunikasi
- g. tidak mudah menyerah

Nilai dasar kepemimpinan tersebut merupakan arah yang harus dijalankan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.

Apabila seorang pemimpin telah menjalankan nilai dasar kepemimpinan, maka antara pemimpin wanita dan laki-laki tidak ada bedanya, sehingga proses organisasi atau institusi yang dipimpinnya akan berjalan sesuai tujuan dengan meminimalkan resiko yang mungkin muncul. Karena itu, kepemimpinan wanita dimanapun juga perlu diberi kesempatan yang sama seperti yang dikemukakan Yusuf (dalam Tan, 1991 : 38) yaitu,

- a. Kepemimpinan perempuan dalam era pembangunan sekarang dan masa yang akan datang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan agama bangsa.
- b. Kepemimpinan perempuan dapat berkembang jika pendidikan perempuan dapat ditingkatkan sama dengan laki-laki.
- c. Kepemimpinan perempuan harus dinyatakan perlu dan penting untuk dikembangkan disegala bidang dan bagi semua tingkat.
- d. Pemimpin laki-laki perlu diyakinkan pentingnya kepemimpinan perempuan, dan diyakinkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak akan menyaingi potensi kepemimpinan laki-laki. Namun justru akan melengkapi dan memperkaya kepemimpinan laki-laki. Untuk itu kepemimpinan laki-laki perlu memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada pemimpin perempuan.
- e. Pemerintah bersama-sama dengan organisasi-organisasi perempuan perlu menyusun “masterplan”, tentang bagaimana meningkatkan kepemimpinan perempuan di segala bidang kehidupan bangsa dan negara.

Dengan demikian, bahwa kepemimpinan wanita berfungsi sebagai mitra dari kepemimpinan laki-laki, dan wanita memiliki porsi yang jelas keikutsertaannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Lambat laun kedudukan dan kepemimpinan wanita secara nyata akan sama dengan kaum laki-laki, sehingga tidak ada lagi pemisahan gender dalam berusaha dan mengabdikan diri untuk pembangunan yang sesuai dengan cita-cita nasional.

4. Partisipasi Politik Wanita

Keberhasilan program pemerintah dan pembangunan yang dicita-citakan tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin berhasil pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Karena itu, dalam program pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masyarakat, yang pada hakekatnya bahwa pembangunan dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan tidak lepas dari peranan wanita yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi wanita perlu untuk diperhitungkan jika tidak ingin disebut bahwa wanita Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan wanita di negara-negara lain.

Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus

berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa.

Hak suara wanita memiliki kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mengambil dan menentukan keputusan, begitupula apabila wanita terlibat dalam pemilihan umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya, apalagi ia duduk sebagai pengurus dari salah satu partai, seperti dikemukakan Nilakusuma (1960:180) yaitu,

Kita harus insyaf dan mengerti akan keharusan adanya partai-partai di suatu negara, dan sumbangan-sumbangan apa yang diberikan partai untuk pembangunan neegara dan bangsa. Di samping ini, kita harus mengerti pula. Bahwa partai-partai itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai ideologi sama, agar di dalam meneruskan suara merupakan kesatuan yang baik. Dengan mempunyai kesadaran ini, wanitapun dapat berdiri sendiri dengan kecerdasannya, memilih partai yang sesuai dengan cita-citanya. Sungguh mengecewakan, jika partai-partai itu menjadi sasaran pencari untuk untuk sendiri, dan wanita dijadikan alatnya karena tidak cukup kesadaran di dalam partai. Jika wanita duduk di dalam partai, bukanlah semata-mata untuk diberi tugas guna menyediakan jamuan pada rapat-rapat partainya atau ketika partai kedatangan tamu agung, tetapi juga memberikan suaranya bersama dengan anggota laki-laki.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan wanita di dalam politik tidak dapat dikesampingkan, karena memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Walaupun demikian, bahwa hak-hak politik yang dimiliki wanita pada kenyataannya tidaklah sesuai yang diinginkan, sebagaimana Suwondo (1981:141) mengemukakan,

1. Kenyataan bahwa jumlah wanita yang duduk dalam badan-badan legislatif belum memadai, disebabkan oleh sistem pencalonan melalui daftar calon, di mana wanita dicantumkan di bagian bawah dari daftar.
2. Kenyataan yang menunjukkan bahwa jabatan/kedudukan penentuan kebijaksanaan (policy making) belum banyak diisi oleh kaum wanita. Maka dalam rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia antara lain disarankan mengenai bidang ini :
 - a. Menggiatkan pendidikan di kalangan wanita tentang pengetahuan kewarganegaraan dan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan partisipasi wanita dibidang pembuatan perundang-undangan yang perlu segera dikeluarkan mengenai : catatan sipil; adopsi; hukum waris atas dasar persamaan hak antara pria dan wanita; hukum acara untuk pengadilan agama; pemberantasan pelacuran; pengadilan anak dan kesejahteraan anak;
 - c. Mengusahakan perbaikan dalam bidang pencalonan anggota-anggota wanita dalam badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - d. Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undanf, terutama yang menyangkut kedudukan dan kesempatan bagi wanita ;

- e. Mengenai peranan wanita dalam kerjasama international :
- dalam pelaksanaan kerjasama international, regional, dan sub regional hendaknya wanita diikutsertakan dalam penentuan kebijaksanaan (policy making).
 - Pemerintah menjamin bahwa wanita terwakili secara seimbang di antara utusan-utusan inti ke semua badan international, koperensi, termasuk yang menangani masalah-masalah politik, hukum, pembangunan ekonomi dan sosial, perencanaan, administrasi dan keuangan, ilmu dan teknologi, lingkungan dan kependudukan.
 - Dalam kerjasama di lingkungan ASEAN, hendaknya segera disertakan pembentukan Permanent Committee on Women dalam struktur ASEAN.

Partisipasi wanita dalam bidang politik, walaupun masih kurang, nampaknya wanita telah berusaha ke arah yang lebih baik dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu yang dimulai dari tahun 2004 untuk memasukkan anggota legislatif yang terpilih sebanyak 30%, begitupula di badan legislatif seperti halnya DPR/DPRD Tk.I dan Tk. II anggotanya minimal 30 % harus wanita. Keadaan ini merupakan hal yang menggembirakan walaupun tidak sebagian atau 50 % wanita, tetapi ke arah proporsi yang seimbang telah dan akan dilaksanakan, yang berarti mengalami perbaikan dari sebelumnya.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan wanita dalam pembangunan nampaknya harus mendapat porsi yang seimbang dengan kaum laki-laki, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf (dalam Tan, 1991 : 35) sebagai berikut,

Di bidang kehidupan politik, baik dari segi eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya, kepemimpinan perempuan telah mulai diperhitungkan walaupun belum seimbang dengan proporsinya dalam masyarakat. Jumlah menteri dalam kabinet ...terbatas, itupun hanya kepentingan tertentu saja yang mestinya ditambah. Sekertaris jendral, direktur jendral dapat dihitung dengan jari. Apakah jabatan yang penuh tanggung jawab tersebut harus dipegang oleh pemimpin laki-laki ? pemimpin perempuan dengan kualitas yang sama nampaknya belum mungkin dipercayai memegang jabatan tersebut. Pemimpin perempuan dalam bidang pertahanan dan keamanan ?

Nampaknya partisipasi wanita dalam bidang politik ini perlu dikaji kembali mengingat jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah wanita yang seharusnya berperan. Karena itu, perlu dikaji kembali bentuk partisipasi yang nyata dalam kehidupan politik bagi kaum wanita. Partisipasi politik bagi kaum wanita perlu mendapatkan penjelasan,

sehingga pengertian partisipasi menjadi jelas, sehingga Budiardjo (1981:3) memberikan penjelasannya yaitu,

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Partisipasi politik seperti di atas tentu saja akan berarti apabila wanita turut terlibat di dalamnya. Di dalam negara yang sedang belajar menuju demokratis yang sesungguhnya seperti Indonesia, adanya partisipasi wanita yang lebih besar maka dianggap menjadi lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi wanita dapat ditunjukkan dalam mengikuti dan memahami masalah politik dan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik bagi wanita itu rendah maka dianggap kurang baik, dicirikan dengan banyak kaum wanita yang tidak menaruh perhatian pada masalah politik atau kenegaraan. Akibatnya dikhawatirkan apabila terjadi kurangnya pendapat mengenai kebutuhan politik wanita yang dikemukakan, maka kepala negara menjadi kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi kaum wanita dan menjadi terabaikan, sehingga cenderung akan melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Dengan demikian, bahwa partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh wanita dapat melalui beberapa jalur, yang meliputi :

- a. Bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja secara formal dapat berperan aktif di lingkungannya sendiri melalui berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah, seperti PKK, Posyandu, KB, dan lain-lain kegiatan yang menggerakkan ibu-ibu ke arah kepentingan bersama. Begitu pula turut memberi penjelasan akan pentingnya menjadi pemilih dalam pemilu yang berlangsung lima tahun sekali guna melangsungkan kegiatan demokrasi dan kenegaraan
- b. Wanita yang menginginkan karier di bidang politik dapat menjadi anggota salah satu partai politik yang sesuai dengan ideologinya, terutama dalam memperjuangkan kaum wanita, dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk dipilih oleh masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilu.

- c. Wanita yang memilih karier di eksekutif atau pemerintahan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan dan beban tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab, apalagi yang bersangkutan dituntut untuk memiliki keterampilan dan kemampuan memimpin, sehingga tidak tergantung pada laki-laki. Kegiatan di pemerintahan ini diharapkan menjadi seorang pengambilan keputusan, seperti menjadi lurah/kepala desa, camat, kepala daerah, atau menjadi kepala bidang/bagian bahkan kepala instansi di tempat kerjanya.
- d. Wanita yang bekerja di bidang yudikatif atau berhubungan dengan hukum sebagai pengacara, jaksa, hakim, atau sebagai polisi penyidik perkara, dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, golongan, dan lain-lain.

Dengan demikian, bahwa partisipasi yang dilakukan wanita tidak saja sebagai partisipasi pasif, juga sebaiknya partisipasi aktif sebagai penentu kebijakan di tempat yang bersangkutan berusaha, agar benar-benar wanita keberadaannya dapat diperhitungkan.

5. Penutup

Prestasi dan keterampilan yang tinggi yang ditunjukkan oleh kaum wanita, telah berhasil membuktikan bahwa wanita memiliki banyak persamaan dengan laki-laki. Dengan kemampuannya tersebut wanita dapat memiliki peran ganda, yaitu menjadi wanita sukses (wanita karier) dengan tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya sebagai ibu rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu kesuksesan wanita di luar dunianya, dapat dilihat dari kepemimpinan seorang wanita. Bahkan, kemampuan – ambisi – keberhasilan wanita dalam kepemimpinan dapat melebihi laki-laki, karena pada wanita tersimpan kekuatan berupa ketegasan, ketegaran, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, sebagai syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Beban dan tanggungjawab wanita sebagai pemimpin ataupun wanita karir lainnya sangatlah besar. Pada sisi lain wanita harus berkarier akan tetapi juga dibebani oleh tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Tanggung jawab seperti ini jelas tidak dimiliki laki-laki. Selain itu, seorang wanita untuk menjadi pemimpin atau berkarier di luar rumah misalnya berperan dalam partai politik atau pemerintahan, lebih banyak mendapatkan hambatan

dibandingkan laki-laki, terutama sikap budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima.

Dengan demikian, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, terutama dalam kepemimpinan dan peranannya dalam kehidupan politik di negara kita perlu terus diupayakan, dalam artian partisipasi wanita agar benar-benar keberadaannya dapat diperhitungkan. Kesejajaran antara wanita dengan laki-laki merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia apabila wanita itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuan yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat kewanitaannya.

Kepustakaan

- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan PT. Gramedia.
- Budiardjo, Miriam (ed). 1981. *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah bunga rampai*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Hall, Ingrid. 1991. *Perempuan Karier : Sebuah ilustrasi dari Kanada*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, Marwah Daud. 1991. *Perempuan Indonesia : Pemimpin masa depan ? mengapa tidak*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah pemimpin abnormal itu ?* Jakarta : CV. Rajawali.
- Mc. Clelland, David. tanpa tahun. *Dorongan Hati Menuju Modernisasi*. Dalam Weiner Myron. *Modernisasi : Dinamika Pertumbuhan*. New York : Voice of America Forum Lecture.
- Mutawali. 1987. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Desa*. Bandung : PT. Karya Nusantara.
- Nilakusuma, S. 1960. *Wanita di dalam dan di luar Rumah*. Bukittinggi : NV. Nusantara.
- Notopuro, Hardjito. 1984. *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Noerhadi, Toeti Heraty. 1991. *Wanita dan Kepemimpinan*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soekarnoputri, Rachmawati. 1991. *Peranan Wanita dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sukarno. 1963. *Sarinah : Kewajiban wanita dalam perdjoangan Republik Indonesia*. Jakarta : buku-buku karangan Presiden Sukarno.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1987. *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Suwondo, Nani. 1981. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tan, Melly G (ed). 1991. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Tilaar, Martha. 1991. *Citra Wanita Indonesia Tahun 2000 : Kamandirian dalam menjawab tantangan pembangunan*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Yusuf, Maftuchaf, 1991. *Kepemimpinan Perempuan : Pemikiran seorang muslimat*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.